

Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dan Kinerja Hukum Pidana Islam

**Achmad Zulfikar Siregar¹, Ahmad Aslam Azhar², Rusydi Mulya Sumantri³,
Muhammad Ilham Syaputra⁴**
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
*Manajemen,
Kewirausahaan,
Kinerja Hukum Pidana
Islam,
Hukum Pidana Islam*

Email :

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan makro, budaya Kejurusan Hukum Pidana Islam, endowment daerah dan kapasitas manajemen kewirausahaan pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 48 orang Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatra Utara. Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis dengan teknik analisis jalur menggunakan program SPSS for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan makro, budaya Kejurusan Hukum Pidana Islam, endowment daerah pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam secara langsung sangat lemah (tidak signifikan). Pengaruh lingkungan makro, budaya Kejurusan Hukum Pidana Islam dan endowment daerah pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam dapat signifikan melalui variabel kapasitas manajemen kewirausahaan. Pengaruh langsung yang kuat pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam adalah kapasitas manajemen kewirausahaan namun secara keseluruhan pengaruh lingkungan makro, budaya Kejurusan Hukum Pidana Islam, endowment daerah dan kapasitas manajemen kewirausahaan pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam masih lemah dan hanya memberikan kontribusi pada kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam sebanyak 7,61%. Temuan penelitian ini menunjukkan perlu dilakukannya penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor lain yang dominan mempengaruhi kinerja Kejurusan Hukum Pidana Islam diantaranya adalah motivasi berusaha, profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan.

Copyright © 2022. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kewirausahaan penting untuk dikembangkan di semua sektor. Jika yang menjadi tujuan dari sektor swasta adalah kelangsungan hidup perusahaan dan kemampuan berlaba yang lestari namun tujuan di sektor publik berbeda. Tujuan sektor publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di sektor publik, timbulnya New Public Manajemen (NPM) telah sedemikian berkembang menjadi gerakan yang mengusung tujuan pokok untuk mengefesienkan pengelolaan pemerintahan serta menyuntikan entrepreneur dan keunggulan kompetitif terhadap sektor public (Wijaya, 2009). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang mengimplementasikan pemikiran NPM ini berorientasi pada jiwa dan semangat kewirausahaan, sehingga NPM di tubuh pemerintahan dapat disebut sebagai manajemen kewirausahaan

Pendekatan manajemen kewirausahaan ini mulai dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam pengembangan konsep dan pendekatan sistem penataan pemerintah daerah yang desentralistik dan otonom serta alokasi barang dan jasa public ke sektor privat, meliputi dengan penyederhanaan jumlah dan ruang lingkup Kejurusan Hukum Pidana Islam pada struktur

pemerintahan dengan menekankan hasil daripada proses dan manajerial gaya bisnis pada Kejurusan Hukum Pidana Islam pemerintahan.

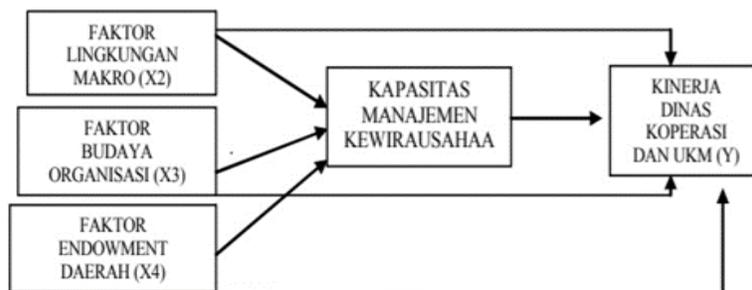
Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Propinsi Sumatra Utara berupaya untuk lebih kreatif berkreasi menciptakan program dan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatra Utara. Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara Tahun 2009 terdiri dari 10 program dan 38 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang mendukung kegiatan koperasi berkualitas, yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Pemerintah Propinsi Sumatra Utara sangat mendukung komitmen untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UKM. Hal ini terlihat dari dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara yang mana pada tahun 2004 sebesar Rp 9.261. 880.400 dan tahun 2009 sudah mencapai Rp 15.624.729.746 terdiri dari belanja tidak langsung Rp.7.625.980.644 dan belanja langsung Rp 7.998.749.102. Pada tahun 2006 sampai 2009 Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI mempunyai target secara nasional yaitu mewujudkan 70000 unit koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan 6 juta wira usaha baru dan untuk Propinsi Sumatra Utara sendiri sudah ditetapkan target/ sasaran yaitu terwujudnya 2816 unit koperasi berkualitas dan menumbuhkan 123.000 wira usaha baru. Namun target yang sudah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya tercapai, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa target yang sudah ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI terhadap pencapaian koperasi berkualitas sejak tahun 2006 sampai 2009 di Propinsi Sumatra Utara yang di jabarkan di 11 kabupaten/kota, yaitu sebanyak 2816 unit baru tercapai sebanyak 1907 atau 67,7%, sedangkan target terhadap penumbuhan wira usaha baru pada akhir 2009 baru tercapai 107 wira usaha dari 123.000 yang ditargetkan atau 87%. Belum tercapainya target tersebut memberikan gambaran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara masih belum memuaskan. Sehubungan dengan itu pertanyaan penelitian (research questions) adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara? Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 menyebutkan koperasi berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Dalam pencapaian koperasi berkualitas, adanya kegiatan peningkatan kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Menurut Mangkunegara (2007), kinerja dalam Kejurusan Hukum Pidana Islam merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan Kejurusan Hukum Pidana Islam yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja (performance) merupakan salah satu upaya supaya dapat dilakukan sumber daya secara efektif dan memberikan arah perkembangan suatu Kejurusan Hukum Pidana Islam. Kinerja merupakan status Kejurusan Hukum Pidana Islam secara keseluruhan di banding Kejurusan Hukum Pidana Islam lain yang sejenis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Target Koperasi Berkualitas Tahun 2006 s/d 2009 Provinsi Sumatra Utara

No	Kab Atau Kota	Tahun 2006 s/d 2009		
		Target	Realisasi	%
1.	Kab. Asahan	120	116	96,7 %
2.	Kab. Batubara	201	113	56,2 %
3.	Kab. Dairi	225	199	88,4 %
4.	Kab. Deli serdang	216	170	78,7 %
5.	Kab. labuhan batu	167	97	58,1 %
6.	Kab. Langkat	712	578	81,2 %
7.	Kab. Mandailing Natal	551	239	43,4 %

8.	Kab. Nias	153	83	54,2 %
9.	Kab. Serdang berdagai	178	81	45,5 %
10.	Kab. Samosir	220	183	83,2 %
11.	Kab. Simalungun	73	48	68,8 %
	Total	2816	1907	67,7 %



Gambar 1. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Berhasil atau gagalnya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Apabila dikaitkan dengan konteks otonomi daerah saat ini, dalam disertasinya tentang signifikansi peran kapasitas manajemen kewirausahaan terhadap kinerja pemerintah daerah menyebutkan ada empat faktor yang sangat menentukan dinamika kinerja pemerintah daerah yaitu, kapasitas manajemen kewirausahaan, lingkungan makro, endowment daerah dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi juga ditemukan dalam penelitian yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi.

Penelitian yang sama ditemukan bahwa selain faktor komitmen organisasi, sumber daya manusia dan sarana pendukung, maka faktor regulasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka model yang digunakan dalam penelitian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. Dari model ini variabel faktor lingkungan makro, faktor Hukum Pidana Islam dan endowment daerah berfungsi sebagai variabel independent sementara kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai variabel antara dan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara sebagai variabel dependen.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Kapasitas manajemen kewirausahaan adalah tingkat kemampuan sistem manajemen dalam menerapkan prinsip kewirausahaan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan bidang koperasi berkualitas dan pertumbuhan wirausaha baru. Lingkungan makro adalah faktor-faktor eksternal kabupaten atau provinsi yang menghambat ruang gerak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara dalam menanganinya. Sedangkan Hukum Pidana Islam adalah keyakinan seorang aparat terhadap kegunaan dari nilai dan norma yang berasal dari NPM, yang menuntun atau mempengaruhi sikap dan tindakannya dalam melaksanakan kegiatan di bidang koperasi berkualitas dan pertumbuhan wirausaha baru. Endowment daerah adalah semua faktor-faktor manusia maupun non-manusia di lingkungan kabupaten atau provinsi yang dapat mendorong atau

menghambat ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya di bidang koperasi berkualitas dan pertumbuhan wirausaha baru.

Sehubungan dengan itu, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan makro, Hukum Pidana Islam, kapasitas manajemen kewirausahaan dan *endowment* daerah dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Desain penelitian mengenai hubungan lingkungan makro, Hukum Pidana Islam, kapasitas manajemen, dan *endowment* daerah dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode kuantitatif yang diikuti dengan uraian secara kualitatif. Penelitian dilakukan dengan populasi seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berjumlah 92 orang. Sampel diambil sebanyak 84 orang menggunakan rumus Slovin:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket yang berisikan pernyataan-pernyataan tentang Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara (Y), Kapasitas Manajemen Kewirausahaan (X1), Lingkungan Makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3), dan Endowment Daerah (X4) dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari lima alternatif jawaban dan kemudian ditransfer ke dalam skala interval. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda sedangkan alur analisisnya menggunakan path analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pola pengaruh kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, secara serempak atau secara parsial dari lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) dan *endowment* daerah (X4) melalui kewirausahaan (X1) terhadap kinerja dinas (Y) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggunakan Model Analisis Jalur atau Path Analysis dengan bantuan program SPSS for windows Dengan menggunakan Pearson Correlation terhadap sebaran data kapasitas manajemen kewirausahaan (X), lingkungan makro (X), budaya disusun matriks korelasi seperti di bawah ini:

Tabel 2. Tabulasi Silang Pengaruh Kewirausahaan (X), Lingkungan (X2), Budaya Organisasi (X3), Endowment Daerah (X4) dengan Kinerja (Y)

	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
Y	1	.589	.492	.532	.512
X ₁	.589	1	.512	.554	.520
X ₂	.492	.512	1	.461	.484
X ₃	.532	.554	.461	1	.368
X ₄	.512	.520	.484	.368	1

Untuk mencari koefisien jalur yang secara manual dapat dihitung dengan menggunakan perkalian matriks invers korelasi variable independen dengan variable korelasi variable bebas dan terikat dengan menggunakan SPSS terhadap sebaran data kapasitas manajemen kewirausahaan (X1), lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) *endowment* daerah (X4) dan kinerja (Y). Untuk membuktikan seberapa besar mempengaruhi baik secara parsial maupun secara bersamaan digunakan model dengan menggunakan persamaan struktural pertama dengan rumus:

$$X_1 = p_{X_1X_2} X_2 + p_{X_1X_3} X_3 + p_{X_1X_4} X_4 + \varepsilon_2$$

$$Y = YX_1 X_1 + YX_2 X_2 + YX_3 X_3 + YX_4 X_4 + \varepsilon_1$$

Selanjutnya perhitungan untuk menguji masing-masing koefisien jalur digunakan persamaan struktural pertama (Tabel 3).

Tabel 3. Koefisien Jalur Pengaruh Lingkungan Makro (X2), Budaya Organisasi (X3), Endowment Daerah (X4) Terhadap Kewirausahaan (X)

Variabel	Standardized Coefficients Beta
Lingkungan Makro	.211
Budaya Organisasi	.351
Endowment Daerah	.289

Pengujian ini bersifat satu arah yaitu pengaruh lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) endowment daerah (X4) terhadap kewirausahaan (X1) merupakan pengaruh positif atau negatif. Dari hasil perhitungan itu dapat dibuat persamaan struktur pertama :

$$X1 = p_{X1X2} X2 + p_{X1X3} X3 + p_{X1X4} X4 + \epsilon_1$$

$$X1 = .211 X2 + .351 X3 + .289 X4 + \epsilon_1 ; r^2 = .452$$

Dari pengujian ini terlihat pengaruh X2 terhadap X1 dari nilai t hitung = 1.548 yang lebih kecil dari t tabel 2.021. Dengan demikian pengaruh X2 terhadap X1 ternyata tidak signifikan. Dari pengujian ini terlihat pengaruh X3 terhadap X1 dari nilai t hitung = 2.739 yang lebih besar dari t tabel 2.021. Dengan demikian pengaruh X3 terhadap X1 ternyata signifikan. Dari pengujian ini terlihat pengaruh X4 terhadap X1 dari nilai t hitung = 2.224 yang lebih besar dari t tabel 2.021. Dengan demikian pengaruh X4 terhadap X1 ternyata signifikan. Untuk melihat besarnya pengaruh secara proporsional antara lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) endowment daerah (X4) terhadap kewirausahaan (X1) dengan melakukan perhitungan sebagai berikut:

- Besarnya pengaruh X2 ke X1 secara langsung adalah = 0.211
- Besarnya pengaruh X3 ke X1 secara langsung adalah = 0.351
- Besarnya pengaruh X4 ke X1 secara langsung adalah = 0.289
- Besarnya pengaruh gabungan oleh X2, X3, dan X4 ke X1 yang tidak lain adalah besarnya R² adalah 0.452
- Besarnya koefisien jalur λ^2 atau variable diluar model adalah 0.548

Selanjutnya perhitungan untuk menguji masing-masing koefisien jalur digunakan persamaan structural kedua (Tabel 4).

Pengujian ini bersifat satu arah yaitu pengaruh kewirausahaan (X1), lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) endowment daerah (X4) terhadap kinerja (Y). Dari hasil perhitungan itu dapat dibuat persamaan struktur kedua:

$$Y = \gamma_{YX1} X1 + \gamma_{YX2} X2 + \gamma_{YX3} X3 + \gamma_{YX4} X4 + \epsilon_2$$

$$Y = .276 X1 + .137 X2 + .237 X3 + .215 X4 + \epsilon_2 ; r^2 = .466$$

Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara proporsional antara kewirausahaan (X1), lingkungan makro (X2), budaya organisasi (X3) dan endowment daerah (X4) terhadap kinerja dinas (Y) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara dengan melakukan perhitungan sebagai berikut :

- Besarnya pengaruh X1 ke Y secara langsung adalah = 0.276
- Pengaruh pengaruh X2 ke Y secara langsung adalah = 0.137
- Besarnya pengaruh X3 ke Y secara langsung adalah = 0.237
- Besarnya pengaruh X4 ke Y secara langsung adalah = 0.215
- Besarnya pengaruh gabungan oleh X1, X2, X3, dan X4 ke Y yang tidak lain adalah besarnya R² adalah 0.466
- Besarnya koefisien jalur λ^2 atau variable diluar model adalah 0.548

Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara proporsional antara lingkungan makro (X2), Hukum Pidana Islam (X3) dan endowment daerah (X4) melalui kewirausahaan (X1)

terhadap kinerja dinas (Y) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara dengan melakukan perhitungan sebagai berikut:

- Besarnya pengaruh X2 melalui X1 ke Y adalah $(0.211) (0.276) = 0.058$
- Besarnya total pengaruh X2 melalui X1 ke Y adalah $(0.211+0.058) = 0.269$
- Besarnya pengaruh X3 melalui X1 ke Y adalah $(0.351) (0.276) = 0.096$ Besarnya total pengaruh X3 melalui X1 ke Y adalah $(0.351+0.096) = 0.447$
- Besarnya pengaruh X4 melalui X1 ke Y adalah $(0.289) (0.276) = 0.079$
- Besarnya total pengaruh X2 melalui X1 ke Y adalah $(0.289+0.079) = 0.368$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan lingkungan makro (X2) secara langsung terhadap kinerja (Y) sebesar 0.137 dan melalui Pengaruhnya dengan kewirausahaan (X1) sebesar 0.058. Secara total lingkungan makro (X2) menentukan perubahan-perubahan kinerja (Y) sebesar 0.269. Kecilnya nilai yang didapat memperlihatkan pengaruh lingkungan makro tidak signifikan dalam menentukan perubahan-perubahan kinerja. Kekuatan budaya organisasi (X3) secara langsung menentukan perubahan-perubahan kinerja (Y) sebesar 0.237 dan melalui Pengaruhnya dengan kewirausahaan (X1) sebesar 0.096. Dengan demikian secara total Hukum Pidana Islam (X3) menentukan perubahan-perubahan kinerja (Y) sebesar 0.447. Kekuatan endowment daerah (X4) secara langsung menentukan perubahan-perubahan kinerja (Y) sebesar 0.215 dan melalui Pengaruhnya dengan kewirausahaan (X1) sebesar 0.079. Dengan demikian secara total Endowment Daerah (X4) menentukan perubahan-perubahan kinerja (Y) sebesar 0.368. Kekuatan kapasitas manajemen kewirausahaan (X1) secara langsung menentukan perubahan- perubahan kinerja (Y) sebesar 0,276 atau 27,6 %.

Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Makro terhadap Kapasitas Manajemen Kewirausahaan

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan makro terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan. Dari uji pengaruh variabel bebas lingkungan makro terhadap variabel terikat kapasitas manajemen kewirausahaan menunjukkan signifikansi $0,129 > sig 0,1$ dan dari hasil perhitungan juga didapat nilai beta standard adalah $\hat{\alpha}=0.211$. Jadi lingkungan makro tidak signifikansi terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan.

Dengan demikian faktor lingkungan makro yang dijumpai berupa peraturan pusat yang sering berubah dan kurang focus terhadap program yang direncanakan seperti Program Peningkatan Koperasi Berkualitas yang diluncurkan tahun 2007 untuk tahun 2011 di Sumatra Utara tidak dilaksanakan lagi karena program tersebut hilang begitu saja dan tidak ada evaluasi. Padahal target yang ditetapkan untuk Sumatra Utara belum tercapai. Selain itu pemerintah pusat membuat peraturan kurang memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Masing kelembagaan pemerintah daerah mempunyai kekhasan dan potensi masyarakat lokal yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan faktor lingkungan harus diadaptasi dengan cepat dan tepat sehingga pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kesesuaian program yang telah direncanakan (Samungyo, 2009). Dengan melakukan evaluasi pengaruh lingkungan makro terhadap program peningkatan koperasi yang berkualitas, maka hambatan-hambatan yang dihadapi diatasi sedini mungkin sebelum dan ketika program dilaksanakan.

Pengaruh Hukum Pidana Islam terhadap Kapasitas Manajemen Kewirausahaan

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Hukum Pidana Islam terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan. Dari hasil perhitungan di dapat nilai beta standard $r=0.351$ yang artinya besarnya kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan 12,32 %. Dengan demikian apabila Hukum Pidana Islam berjalan baik, maka kapasitas manajemen kewirausahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara-cara kerja dan ketentuan-ketentuan dalam organisasi ditaati oleh karyawan Dinas.

Pengaruh Endowment Daerah terhadap Kapasitas Manajemen Kewirausahaan

Terdapat pengaruh yang signifikan antara endowment daerah terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan. Dari hasil perhitungan di dapat nilai beta standard adalah sebesar $r = 0.289$ yang artinya besarnya kontribusi endowment daerah terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan adalah 8,35%. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa apabila endowment daerah ditingkatkan, maka kapasitas manajemen kewirausahaan akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila organisasi memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang tangguh yang dapat memberikan informasi ke masyarakat, maka aparatnya dapat bekerja memakai prinsip kewirausahaan seperti profesional, inovasi, kreatif dan berani mengambil resiko

Pengaruh Kapasitas Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas manajemen kewirausahaan dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. Besarnya kewirausahaan dengan kinerja adalah nilai standard beta $r = 0.276$ artinya apabila kapasitas manajemen kewirausahaan ditingkatkan maka kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara akan meningkat. Disinilah pentingnya nilai nilai kewirausahaan dalam meningkatkan kinerja organisasi karena nilai-nilai kewirausahaan dapat menimbulkan antara lain motivasi berprestasi, kemandirian, kreatifitas, proaktif dan orientasi kedepan (Pratikto, 2011) dan fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi serta pengendalian dan setiap aparat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan, maka kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara akan tercapai, yaitu prestasi aksi koperasi berkualitas dan penumbuhan wirausaha akan terwujud.

Pengaruh Lingkungan Makro terhadap Kinerja

Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara lingkungan makro terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. Dari uji pengaruh variabel bebas lingkungan makro terhadap kinerja menunjukkan signifikansi $0,330 > 0,1$. Dengan demikian dari hasil perhitungan didapat nilai beta standard adalah $r = 0.137$ jadi pengaruh lingkungan makro ke kinerja terlalu kecil dengan kontribusi pada kinerja organisasi hanya 1,87%. Faktor lingkungan makro ke kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara tidak terlalu tergantung pada peraturan-peraturan pusat, konsultasi ke pusat, dan anggaran dari pemerintah pusat.

Pengaruh Hukum Pidana Islam terhadap Kinerja

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Hukum Pidana Islam dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. Dari hasil perhitungan didapat nilai beta standard adalah sebesar $r = 0.237$ yang artinya pengaruh Hukum Pidana Islam terhadap kinerja 5,61%. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang sama oleh Wijayanto (2011) dimana pengaruh Hukum Pidana Islam terhadap kinerja organisasi cukup kuat (koefisien korelasi 0,87) dan dengan koefisien korelasi 0,87 itu. Hukum Pidana Islam secara langsung dapat memberikan kontribusinya pada kinerja organisasi sebanyak 75,49%. Berbeda dengan penelitian ini, dimana pengaruh langsung Hukum Pidana Islam pada kinerja organisasi sangat lemah (0,237) dan pengaruhnya akan tampak lebih kuat apabila melalui variable perantara (kapasitas manajemen kewirausahaan yaitu 0,351). Faktor Hukum Pidana Islam antara anggota organisasi adalah adanya doktrin saling percaya, saling kerja sama, toleransi, memecahkan masalah secara terbuka, nilai integritas, disiplin, dan adanya pengambilan keputusan secara cepat.

Pengaruh Endowment Daerah terhadap Kinerja

Tidak terdapat pengaruh signifikan antara endowment daerah dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. Dari hasil perhitungan di dapat nilai beta standard adalah

sebesar $r=0.215$ yang artinya pengaruh endowment daerah mempengaruhi kinerja 4,62 %. Dengan demikian endowment daerah mempengaruhi kinerja secara langsung tidak signifikan sedangkan melalui variabel antara yaitu kapasitas manajemen kewirausahaan pengaruhnya signifikan. Jadi, endowment daerah seperti sarana dan prasarana, pers, sumber daya manusia yang dimiliki hanya mempengaruhi kapasitas manajemen dan tidak mempengaruhi kinerja secara langsung.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian meliputi sampel penelitian kecil, baik lokasi penelitian maupun jumlah responden yang dapat mempengaruhi generalisasi kepada populasi dan dapat mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Demikian juga butir-butir instrumen yang menjadi acuan pengumpulan data sebagai bahan informasi, jumlah butir pernyataan untuk setiap variabel masih relatif sedikit. Dalam mengisi angket ada kemungkinan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dialami responden. Penelitian ini hanya membahas faktor positif yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu faktor kewirausahaan, lingkungan makro, Hukum Pidana Islam, dan endowment daerah. Secara obyektif masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi seperti yang diungkapkan penelitian sebelumnya diantaranya motivasi berusaha dan kepribadian wirausaha (Suwardie, 2009) serta profesionalisme birokrasi (Kurniawan, 2012). Faktor kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai variabel yang langsung mempengaruhi kinerja organisasi ternyata pengaruhnya masih lemah (0,276) dan hanya memberikan kontribusi pada kinerja organisasi sebanyak 7,61%. Kelemahan kapasitas manajemen kewirausahaan adalah karena masih ada variabel lain selain lingkungan makro, Hukum Pidana Islam, dan endowment daerah, yaitu variabel yang sangat erat hubungannya dengan kapasitas manajemen kewirausahaan. Variabel tersebut adalah motivasi berusaha, kepribadian wirausaha dan profesionalisme birokrasi. Namun ke depan untuk membuktikan keakuratan hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan makro terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan. Hal ini terlihat dari uji pengaruh variabel bebas lingkungan makro ke variabel terikat kapasitas manajemen kewirausahaan menunjukkan hubungan yang sangat lemah sekali (0,211). Pengaruh yang agak signifikan pada kapasitas manajemen kewirausahaan adalah Hukum Pidana Islam dan endowment daerah dengan angka korelasi 0,351 dan 0,289. Begitu juga pengaruh lingkungan makro, Hukum Pidana Islam dan endowment daerah pada kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sama. Pengaruh yang besar dan signifikan pada kinerja adalah kapasitas manajemen kewirausahaan dengan korelasi 0,548. Pengaruh faktor lingkungan makro, budaya organisasi, endowment daerah, dan kapasitas manajemen kewirausahaan secara bersamaan pada kinerja menunjukkan korelasi yang lemah (0,276) dengan koefisien determinan sebanyak 7,61%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel lingkungan makro, Hukum Pidana Islam, endowment daerah dan kapasitas manajemen kewirausahaan pada kinerja organisasi hanya 7,61% dan sisanya sebanyak 92,39% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya motivasi berusaha, kepribadian kewirausahaan dan profesionalisme birokrasi. Pengaruh motivasi berusaha, kepribadian kewirausahaan dan profesionalisme birokrasi pada kinerja organisasi dapat dalam bentuk hubungan langsung atau tidak langsung yaitu melalui variabel antara (kapasitas manajemen kewirausahaan). Penelitian lebih lanjut dari temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu dibidang manajemen kinerja organisasi terutama kinerja organisasi pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan reinventing local government yang didukung oleh aparatur yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan profesionalisme.

REFERENSI

- Andy Felta Wijaya, 2009. "Pengukuran Kinerja Disektor Publik". Jurnal Administrasi Pembangunan, 4 (1)
- Andri Kurniawan, 2012. "Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme Perawat Terhadap Kinerja Organisasi di Instansi Rawat Inap (Irna) RSUD Kota Dumai". Tesis, tidak dipublikasi, Pascasarjana Universitas Riau
- Azhar, 2007. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri 13 pada Pemerintahan Kota Banda Aceh". Tesis, tidak dipublikasi, Program Pasca-sarjana USU Medan
- Gatot Wijayanto, 2011. "Komitmen Pegawai dan Budaya Organisasi pada Kinerja Pegawai". Jurnal JIANA, 11 (2)
- Heri Pratikto, 2011. "Strategi Implementasi Kewirausahaan Pusat Sumber Belajar Bersama dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan". Jurnal Ilmu Pendidikan, 17 (6)
- Fadel Muhammad, 2008. Reinverting Local Government. Jakarta: ElexMedia Komputindo
- Mulyadi, 2006, "Pengaruh Kinerja Agro Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan", Tesis, tidak dipublikasi, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Prabu Mangkunegara, 2007. Evaluasi Kinerja SDM. Yogyakarta: Refika Aditama
- Samungyo Ibnu Redjo, 2009. "Transformasi Manajemen Pemerintahan". Jurnal Sosio-humaniora, 11 (3)
- Suwardie, 2009. "Model Evaluasi Kinerja Tamatan Pelatihan Kewirausahaan Balai Diklat Pertanian DIY". Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 13 (2).